Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERSETUBUHAN YANG
DILAKUKAN SEORANG AYAH TERHADAP ANAK KANDUNGNYA
(Studi Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mnd)**

Marina^{a*}

rindenganmarina@gmail.com

M. Syahrul Borman^{b}**

m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id

Nur Handayati^{c*}**

nur.handayati@unitomo.ac.id

Wahyu Prawesthi^{d**}**

wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id

ABSTRACT

This research examines the criminal liability of a father who committed sexual assault against his biological daughter, based on the case decision No. 28/Pid.Sus/2024/PN Mnd. The study explores the legal framework surrounding child sexual abuse within the family and highlights the legal consequences for the perpetrator under Indonesian law. The research uses a normative legal approach, incorporating statutes, conceptual analysis, and case studies. The findings confirm that the defendant, Dominggus Momone, was held criminally responsible for the act, having committed a serious crime that violates the rights and dignity of his child. The legal implications of this case emphasize the importance of legal protection for children and the consequences of child abuse perpetrated by close family members. The study also explores the judicial reasoning behind the verdict, considering both aggravating and mitigating factors. This research serves as a critical analysis of the legal mechanisms aimed at safeguarding children's rights and promoting justice.

Keywords: *Criminal Liability, Child Sexual Abuse, Parental Responsibility, Legal Protection for Children, Judicial Decision*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana seorang ayah yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya, berdasarkan putusan kasus Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mnd. Penelitian ini mengeksplorasi kerangka hukum mengenai pelecehan seksual anak dalam keluarga dan menyoroti konsekuensi hukum bagi pelaku menurut hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang mencakup identifikasi peraturan perundang-undangan, analisis konseptual, dan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa, Dominggus Momone, dijatuhi pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, yang merupakan tindak pidana serius yang melanggar hak dan martabat anak. Implikasi hukum dari kasus ini menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi anak dan konsekuensi dari kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga dekat. Penelitian ini juga mengulas pertimbangan hukum yang mendasari putusan, dengan mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan. Penelitian ini menjadi analisis kritis terhadap mekanisme hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan menegakkan keadilan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kekerasan Seksual Anak, Tanggung Jawab Orang Tua, Perlindungan Hukum Anak, Keputusan Pengadilan

1. PENDAHULUAN

Kesadaran hukum masyarakat haruslah dimulai dari lingkup yang paling kecil yaitu lingkup lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga ayah ibu sebagai pasangan suami istri haruslah bisa menjaga keharmonisannya (Madani, 2016). Apabila pasangan suami istri tidak bisa menjaga hubungan dengan baik maka yang timbul adalah suatu pertengkaran dalam lingkungan keluarga. Pertengkaran dalam lingkungan keluarga dapat menimbulkan kejahatan dalam lingkungan keluarga yang mana kejahatan ini sangatlah banyak terjadi namun jarang sekali yang terungkap karena dianggap sebagai urusan pribadi keluarga. Hal tersebut juga dikarenakan oleh kebiasaan masyarakat yang cenderung menutup-nutupi atau disembunyikan dari khalayak umum karena memang dianggap suatu aib keluarga (Hamdani & Fauzia, 2022).

Kejahatan yang timbul dalam lingkungan keluarga antara lain kekerasan fisik, pemukulan oleh Ayah, penganiayaan, kekerasan psikis dan bahkan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya. Kekerasan yang dilakukan seorang ayah dalam lingkungan keluarga mempunyai pengaruh yang sangat buruk terhadap perkembangan psikologis anak yang masih dalam pertumbuhan (Tio et al., 2022).

Sebagai generasi penerus bangsa anak merupakan tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa, dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Namun pada akhir-akhir ini sering terdapat tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak dibawah umur, dan hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak yang notabene generasi penerus bangsa (Ulya, 2021). Salah satu sebab terjadinya tindak pidana anak dibawah umur yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya tidak lain adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat dan kenyataan yang terjadi selama ini justru di salah gunakan oleh ayah kandungnya sendiri, misalkan akses Internet yang telah berkembang dimana hal ini justru disalah gunakan oleh sebagian besar anak dibawah umur untuk membuka situs-situs Porno hal tersebut berpengaruh terhadap seorang anak (Jati, 2023).

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap berbagai macam ancaman mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Maka diperlukan suatu perlindungan hukum yang memihak terhadap kepentingan anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam suatu keluarga, masyarakat, bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa demi pengembangan manusia seutuhnya maka setiap orang wajib mengusahakan perlindungan terhadap anak.

Di berbagai massa media cetak maupun elektronik banyak diberitakan mengenai kesesilaan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan anak dibawah umur yang bersetubuhan dengan ayah kandungnya sendiri. Di dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana menurut pasal 287 (KUHP) sebenarnya telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan seorang ayah terhadap anaknya sendiri dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan dalam bab 1 ketentuan Umum Pasal 1 angka 1. “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termaksud anak yang masih didalam kandungan”.

Sedangkan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sebagai salah satu contoh kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Manado Dengan putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mnd, Adapun kronoliginya adalah Terdakwa Dominggus Momone alias Minggu, pada bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Kelurahan Malendeng Lingkungan 1 Kecamatan Paal Dua Kota Manado dan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, berawal anak korban Kristin Misel Momone yang berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran: No AL.786.0117497 tanggal 01 september 2015, akan pergi k rumah ibunya di Tomohon, tidak berselang lama Anak korban dipanggil oleh terdakwa Dominggus Momone alias Minggu (ayah kandung Anak Korban) untuk masuk ke dalam kamarnya, setelah didalam kamar terdakwa langsung melucuti celana Anak korban dan memaksa memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban, pada saat kemaluan terdakwa dimasukan ke dalam kemaluan Anak korban dalam posisi kemaluan terdakwa masuk setengah ke dalam kemaluan Anak korban, saksi Anak Falentino Momone datang mengetuk pintu kamar memanggil terdakwa, mengetahui saksi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

anak Falentino Momone datang, terdakwa langsung mengusir dan menyuruh Anak korban keluar kamar dengan suara yang keras.

Terdakwa Dominggus Momone alias Minggu, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: VER/222/VII/2023/Rs.Bhay, tanggal 01 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dicky Corneng, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Manado, menerangkan pada pemeriksaan terhadap Anak korban Kristin Misel Momone ditemukan: pada selaput dara tampak robekan lama posisi jam dua belas, tiga, enam dan Sembilan searah jarum jam dengan kesimpulan adanya robekan lama pada selaput darah akibat kekerasan tumpul.

Akibat perbuatannya tersebut, Terdakwa Dominggus Momone alias Minggu tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Yang dilakukan Oleh Orang Tua dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan tiga pendekatan yaitu *statute approach*, *conceptual approach* dan *case study approach*. *Statue approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation* (Marzuki, 2011). Kemudian *conceptual approach* merupakan pendekatan dengan melihat pendapat para sarjana yang terdapat di dalam berbagai literatur sebagai landasan pendukung. Selanjutnya adalah *case study* merupakan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

menganalisis kasus-kasus dalam masyarakat yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Seorang Ayah yang Menyetubuhi Anaknya Dibawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Setiap perbuatan melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi. Tindak pidana menimbulkan suatu bencana bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari (sebab) dengan melahirkan suatu akibat. Tindak pidana terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya (Kurniawan, 2019).

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut, bahwa: Dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana (Huda, 2006).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan, apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut, orang itu mempunyai kesalahan. Hal ini sangat penting dan sangat mendasar sifatnya, karena dalam ajaran hukum pidana, ada asas pertanggungjawaban yang secara tegas menyatakan bahwa tidak dipidana tanpa ada kesalahan. Berdasar pada asas ini, pertanggungjawaban sangat erat kaitannya dengan kesalahan. Untuk dapat menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan atau tidak.

Berdasarkan asas pertanggungjawaban, maka untuk adanya pertanggungjawaban adalah kesalahan. Kesalahan merupakan unsur yang bersifat subyektif dari tindak pidana, maka kesalahan memiliki dua segi yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis, kesalahan itu harus dicari di dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Ditinjau dari segi yuridis, kesalahan itu adalah dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku. Pemakaian istilah kesalahan dalam arti yuridis misalnya orang yang dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan. Kesalahan yuridis dapat dibedakan antara, pemakaian dalam arti menerangkan keadaan fisik seseorang yang melakukan suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipertanggung-jawabkan dan pemakaian dalam arti bentuk kesalahan di dalam undang-undang yang berupa kesengajaan dan kealpaan (Andi, 2012).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Syarat seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban dapat dilihat dari adanya sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab diatur dalam Pasal 44 KUHP, berdasarkan pasal tersebut seseorang apabila telah melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang mana seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya maupun gangguan dalam kemampuan berpikir sehatnya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya. Tidaklah dapat dipertanggungjawabkan padanya, oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya.

Jika menelisik pada kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya yang di bawah umur diketahui bahwa Terdakwa DOMINGGUS MOMONE alias MINGGUS, pada bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Kelurahan Malendeng Lingkungan 1 Kecamatan Paal Dua Kota Manado dan pada hari minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat dikompleks Ruan Malendeng atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara Bersama-sama.

Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mnd Terdakwa DOMINGGUS MOMONE alias MINGGUS harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya yaitu:

- a. Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban Kristin Misel Momone.
- b. Bahwa kejadian tersebut pertama kali terjadi dirumah Oma anak korban bertempat di Kelurahan Malendeng Lingkungan I Kecamatan Paal Dua Kota Manado pada bulan Maret 2021 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 bertempat di Kompleks Rutan Malendeng Kota Manado.
- c. Bahwa pada bulan Maret 2023 tepatnya pukul 15.00 Wita, anak saksi Falentino Kristivino Momone akan berangkat ke Tomohon, dan bermaksud untuk memanggil terdakwa yang berada didalam kamar. Sebelum mengetuk pintu kamar, anak saksi Falentino Kristivilon Momone mengintip dari lubang pintu kamar terdakwa, dan melihat terdakwa sedang tiduran dan Kakak Misel Momone sedang berada diatas perut terdakwa dengan posisi terdakwa sudah tidak mengenakan baju dan celana terdakwa sudah berada dibawah lutut, sedangkan anak korban Kristin Misel Momone masih menggunakan baju namun sudah tidak menggunakan celana. Pada saat itu anak saksi Falentino Kristivilon Momone melihat tangan terdakwa berada di pinggang anak korban Kristin Misel Momone. Selanjutnya anak saksi Falentino Kristivilon Momone mengetuk pintu kamar dan memanggil terdakwa, dan mendengar terdakwa mengatakan pada anak korban Kristin Misel Momone “Pigi Jo Sana (artinya : Pergi Sana)”.
- d. Bahwa saat itu anak saksi Falentino Kristivilon Momone mencari Kakak dari anak saksi Falentino Kristivilon Momone yang bernama anak saksi Nayla Yezrril Yafia Momone dan mengatakan pada anak saksi Nayla Yezrril Yafia Momone “Kakak Papa ada Bekeng Nakal Pa Misel (artinya:Kakak ayah ada berbuat nakal pada Misel)” kemudian anak saksi Nayla Yezrril Yafia Momone bertanya “Pa Sapa Pe Kamar? (artinya:Dikamar Siapa?)”, lalu anak saksi menjawab “Mama Pe Kamar (artinya:Kamarnya Mama)”,
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 14.30 Wita bertempat di Kompleks Rutan Malendeng Kota Manado, anak korban Kristin Misel Momone diminta untuk memperbaiki handphone terdakwa. Setelah memperbaiki handphone terdakwa, anak korban Kristen Misel Momone berniat untuk keluar rumah, akan tetapi anak korban Kristin Misel Momone langsung ditarik kedalam kamar oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa melucuti celana dan membuka pakaian anak korban Kristin Misel Momone serta meremas payudara anak

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

korban Kristin Misel Momone. Kemudian terdakwa menghisap kemaluan anak korban Kristin Misel Momone, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban Kristin Misel Momone layaknya hubungan badan suami isteri sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban Kristin Misel Momone.

- f. bahwa nak korban Kristin Misel Momone tidak menceritakan peristiwa tersebut pada orang lain karena terdakwa mengancam anak korban Kristin Misel Momone dan menyuruh anak korban Kristin Misel Momone untuk diam dan jangan bilang siapa-siapa karena terdakwa mengancam akan membunuh anak korban Kristin Misel Momone.
- g. Bahwa telah dilakukan Visum Et Repertum Nomor:VER/222/VII/2023/Rs. Bhay tanggal 1 Agustus 2023 terhadap anak korban Kristin Misel Momone, yang ditanda tangani oleh dr. Dicky Conreng, selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Manado. Pada pemeriksaan ditemukan.
 - a) Pada selaput dara tampak robekan lama posisi jam dua belas, tiga, enam dan Sembilan searah jarum jam.
 - b) Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil negatif.
- h. Bahwa pada saat kejadian, anak korban Kristin Misel Momone masih berumur 12 (dua belas) Tahun sebagaimana bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2015006074 tanggal 1 September 2015.

Maka dari itu Terdakwa Dominggus Momone alias Minggu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh Orang Tua kandungnya, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pertimbangan Hakim dalam Memberi Putusan pada Pelaku Persetubuhan yang Dilakukan Seorang Ayah terhadap Anak kandungnya Dibawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Sebelum memutus suatu perkara majelis hakim haruslah mempertimbangkan apakah seseorang telah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana atau tidak yang didakwakan kepada terdakwa, maka keseluruhan dari unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh JPU kepada terdakwa haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya.

Bahwa berdasarkan kasus di atas, terdakwa telah didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang dimaksudkan adalah orang yang diajukan ke muka persidangan, karena adanya surat dakwaan dari Penuntut Umum atas dirinya.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Dominggus Momone alias Minggu yang setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa terhadap frasa ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu” Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain”, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternative perbuatan tersebut dibuktikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan Visum et Repertum dipersidangan yang bersesuaian antara satu sama lain, terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap anak korban Kristin Misel Momone, dimana pertama kali terjadi dirumah Oma anak korban bertempat di Kelurahan Malendeng Lingkungan I Kecamatan Paal Dua Kota Manado pada bulan Maret 2021 dan terakhir pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 bertempat di Kompleks Rutan Malendeng Kota Manado.

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2023 tepatnya pukul 15.00 Wita, Anak saksi Falentino Kristivilon Momone akan berangkat ke Tomohon, dan bermaksud untuk memanggil terdakwa yang berada didalam kamar. Sebelum mengetuk pintu kamar, anak saksi Falentino Kristivilon Momone mengintip dari lubang pintu kamar terdakwa dan melihat terdakwa sedang tduran dan kakak dari anak saksi Falentino Kristivilon Momone yaitu anak korban Kristin Misel Momone sedang berada diatas perut terdakwa dengan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

posisi terdakwa sudah tidak mengenakan baju dan celana terdakwa sudah berada dibawah lutut, sedangkan anak korban Kristin Misel Momone masih menggunakan baju namun sudah tidak menggunakan celana. Pada saat itu anak saksi Falentino Kristivilon Momone melihat tangan terdakwa berada di pinggang anak korban Kristin Misel Momone. Selanjutnya Anak saksi Falentino Kristivilon Momone mengetuk pintu kamar dan memanggil terdakwa, dan mendengar terdakwa mengatakan pada anak korban Kristin Misel Momone “Pigi Jo Sana (artinya:Pergi Sana). Pada saat itu anak saksi Falentino Kristivilon Momone langsung mencari Kakak dari anak saksi Falentino Kristivilon Momone yang bernama anak saksi Nayla Yezzil Yafia Momone dan mengatakan pada anak saksi Nayla Yezzil Yafia Momone”Kakak Papa ada Bekeng nakal Pa Misel (artinya : Kakak ayah ada berbuat nakal pada Misel)”, kemudian anak saksi Nayla Yezzil Yafia Momone bertanya “Pa Sapa Pe Kamar? (artinya: Dikamar Siapa?)” lalu anak saksi menjawab “Mama Pe Kamar (artinya : Kamarnya Mama).

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 14.30 Wita bertempat di Kompleks Rutan Malendeng Kota Manado, Anak korban Kristin Misel Momone diminta untuk memperbaiki handphone terdakwa. Setelah memperbaiki handphone terdakwa, anak korban Kristin Misel Momone berniat untuk keluar rumah, akan tetapi anak korban Kristin Misel Momone langsung ditarik kedalam kamar oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa melucuti celana dan membuka pakaian anak korban Kristin Misel Momone serta meremas payudara anak korban Kristin Misel Momone. Kemudian terdakwa menghisap kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban Kristin Misel Momone layaknya hubungan badan suami isteri sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban Kristin misel Momone.

Menimbang, bahwa anak korban Kristin Misel Momone tidak menceritakan peristiwa tersebut pada orang lain karena terdakwa mengancam anak korban Kristin Misel Momone dan menyuruh anak korban Kristin Misel Momone untuk diam dan jangan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

bilang siapa-siapa karena terdakwa mengancam akan membunuh anak korban Kristin Misel Momone.

Menimbang, bahwa anak saksi Nayla Yezzil Yafia Momone dipersidangkan memberikan keterangan bahwa ibu dari anak saksi Nayla yezzil Yafia Momone yang juga adalah ibu dari anak korban Kristin Misel Momone pada akhirnya mengetahui perbuatan terdakwa, dimana anak korban Kristin Misel Momone langsung menceritakan bahwa anak korban Kristin Misel Momone tidak pulang kerumah karena terdakwa mengatakan akan mengulangi perbuatan persetubuhan tersebut. Dan setelah mendengar peristiwa tersebut, ibu anak korban Kristin Misel Momone kemudian langsung mengambil Alkitab dan menyuruh untuk melakukan sumpah di Alkitab, lalu anak korban Kristin Misel Momone dan anak saksi Nayla Yezzil Yafia Momone melakukan sumpah tersebut.

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut juga pada akhirnya diketahui oleh Tante dari anak korban Kristin Misel Momone yang bernama Partini Silam dan saksi Rahmawati Tambaru yang mendengarkan pengakuan dari anak korban Kristin Misel Momone, anak saksi Nayla Yezzil Yafia Momone dan anak saksi Falentino Kristivilon Momone yang melihat langsung kejadian tersebut tanpa sepengetahuan terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, terhadap anak korban Kristin Misel Momone telah dilakukan Visum Et Repertum Nomor: VER/222/VII/2023/Rs.Bhay, tanggal 1 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Dicky Conreng, selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Manado. Pada pemeriksaan ditemukan:

- a. Pada selaput dara tampak robekan lama posisi jam dua belas, tiga, enam dan Sembilan searah jarum jam.
- b. Orang ini melakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil negatif.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Kesimpulan:

Pada saat pemeriksaan pada seorang perempuan ditemukan adanya robekan lama pada selaput darah akibat kekerasan tumpul.

Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/kegiatan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa saat ini anak korban Kristin Misel Momone sudah tidak lagi bersekolah dan pada saat kejadian anak korban Kristin Misel Momone berumur 12 (dua belas) tahun sebagaimana bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2015006074 tanggal 1 September 2015, sehingga dapat disimpulkan bahwa anak korban Kristin Misel Momone masih tergolong anak.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa:

Pasal 15

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- b. Perlibatan dalam sengketa bersenjata.
- c. Perlibatan dalam kerusuhan sosial.
- d. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
- e. Perlibatan dalam peperangan, dan
- f. Kejahatan seksual.”

Pasal 20

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

perubahan atas Undang-undang nomor 17 tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sebagai seorang yang dewasa, yang mempunyai hubungan keluarga dengan anak korban Kristin Misel Momone yaitu sebagai ayah kandung dari anak korban Kristin Misel Momone, seharusnya dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak korban Kristin Misel Momone, termasuk tidak melakukan hubungan seksual dengan anak korban Kristin Misel Momone.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama

Menimbang, bahwa terhadap frasa ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu “Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara Bersama-sama”, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternative perbuatan tersebut dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan Visum et Repertum dipersidangan yang bersesuaian antara satu sama lain, terungkap bahwa terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan anak korban Kristin Misel Momone, dimana anak korban Kristin Misel Momone adalah anak kandung dari

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat yang terlampir dalam berkas Perkara Terdakwa, berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 717ILT2015006074 tanggal 1 September 2015, yang menerangkan bahwa anak korban Kristin Misel Momone adalah anak ketiga Perempuan dari Selvi Silam dan Dominggus Momone (Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dilakukan oleh Orang Tua telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa.

Adapun keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa memberikan aib dan merusak masa depan anak korban.
- Anak korban masih tergolong anak.
- Anak korban adalah anak kandung dari terdakwa sendiri.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatan terdakwa.

Keadaan yang meringankan:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Amar Putusan

1. Menyatakan terdakwa Dominggus Momone alias Minggu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua” Sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 7171LT2015006074 tanggal 1 September 2015 atas nama Kristin Misel Momone, tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

Analisis

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu, berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, tentunya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang terdiri pertimbangan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Tuntutan Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti selain itu dilihat dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.

Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain hal di atas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum.

Selain dari apa yang dijelaskan Penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Sebagaimana telah diungkapkan diatas, tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, yang mana perbuatan tersebut mengacu baik pada pelakunya maupun akibat perbuatannya. Hubungan ini demikian eratnya, dimana seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana terhadapnya, maka ia harus pula menanggung akibat dari perbuatan itu dalam bentuk pemidanaan.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 1) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
- 2) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu:
 - a. Disengaja.
 - b. Sikap kurang Hati-Hati atau lalai.
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Dihubungkan dengan Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mnd. Elemen kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari terdakwa Dominggus Momone alias Minggu berusia 41 tahun memiliki jiwa (bathin) yang sehat, dan tidak terdapatnya kondisi-kondisi tertentu yang dianggap sebagai kondisi-kondisi yang memaafkan, yang oleh orang lain dapat dimaklumi kenapa ia melakukan tindakan tersebut.

Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan Hakim tidak menilai dari suatu pihak saja melainkan Majelis Hakim dapat melihat keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa, adapun keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan terdakwa memberikan aib dan merusak masa depan anak korban, Anak korban masih tergolong anak, Anak korban adalah anak kandung dari terdakwa sendiri, Terdakwa tidak mengakui perbuatan terdakwa. Adapun hal-hal yang meringankan adalah Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah menguraikan dan selanjutnya menganalisa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara ini, menurut Penulis pertimbangan ataupun penilaian-penilaian hakim dalam perkara ini sudah obyektif, telah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Dan hakim pun telah melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim telah mempertimbangkan keadaan-keadaan terdakwa, seperti yang tertera dalam surat putusan bahwa hakim telah

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

mempertimbangkan pribadi para terdakwa. Tujuan utama dari penjatuhan hukuman adalah agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberikan efek jera bagi diri terdakwa dan masyarakat.

Dengan demikian dan berdasarkan hal-hal diatas, maka prosedur persidangan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mnd sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu Menyatakan terdakwa Dominggus Momone alias Minggu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua” Sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, terdakwa Dominggus Momone alias Minggu dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Mnd secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung di bawah umur. Terdakwa dinilai memiliki kesadaran penuh atas perbuatannya, berada dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani, serta tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari tindakannya. Oleh karena itu, perbuatannya memenuhi unsur Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. **Kedua**, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dilakukan berdasarkan alat bukti, keterangan para pihak, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan antara lain

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

adalah bahwa korban merupakan anak kandung terdakwa sendiri dan masih tergolong anak di bawah umur, serta terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Sementara itu, sikap sopan terdakwa di persidangan dan belum pernah dihukum menjadi faktor yang meringankan. Dengan demikian, prosedur persidangan serta dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan yakni hendaknya menjadi peran penting dalam mendidik dan menjaga masa depan anak. Jangan menjadikan anak sebagai tempat pelampiasan emosional orang tua karena beberapa faktor. Selain itu masyarakat secara umum hendaknya berpartisipasi, mencegah secara aktif segala bentuk tindak pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya karena kejahatan tersebut terbilang kejam dan sangat merugikan. Kemudian hakim yang menangani tindak pidana terhadap anak di masa yang akan datang agar menjatuhkan pidana yang maksimal dan hendaknya tetap konsisten pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga diharapkan dapat memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Andi, H. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Medan Sofmedia.
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). Tradisi Merariq dalam Kacamata Hukum Adat dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(6), 433–447. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i6.245>
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana.
- Jati, R. P. (2023). *Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bekasi Masih Mendominasi*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/11/03/kekerasan-seksual-pada-anak-di-bekasi-masih-mendominasi>
- Kurniawan, B. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyertaan Penyalahgunaan Usaha Perkoperasian dengan Modus Menaikkan*

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Suku Bunga (Studi Putusan Nomor: 235/Pid.sus/2014/PN.Lmj). Universitas Lampung.

Madani. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Tio, G., Adi, Y., & Setiawan, J. (2022). Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Respublica*, 21(2), 155–178.

Ulya, N. H. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Perspektif Negara Dan Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Law and Family Studies*, 4(1), 2622–3015.